

PROGRAM BANTUAN KEUANGAN DESA DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Bobby Satya Mardi dan Zulkarnaini

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, 28293

Abstract: Program Financial Assistance and Welfare Society. The study uses the theory of Van Meter and Van Horn. This research into the types of qualitative research, respondents from the village as well as the board companion PPD in the village. This is the basis of decision of the respondents selected their consideration and is considered the most knowing of the issues with the purposive sampling method. Analysis of the data in this study used a qualitative approach. Based on the survey results revealed that the implementation of the Financial Assistance Program To Young Village District of Bandar Setia Sekijang Pelalawan Riau province and sub-indicators based on program preparation phase is maximal implemented. Factors that inhibit, namely socialization factors, factors supporting facilities. The impact of the program is good enough to improve the welfare of rural communities.

Abstrak: Program Bantuan Keuangan Desa dan Kesejahteraan Masyarakat. Penelitian menggunakan teori Van Meter dan Van Horn. Penelitian ini masuk dalam jenis penelitian kualitatif, responden dari pendamping desa serta pengurus PPD di desa. Dasar pengambilan responden ini adalah pertimbangan mereka yang terpilih dan dianggap paling mengetahui mengenai masalah yang diteliti dengan metode *purposive sampling*. Analisis data dalam penelitian ini yang menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan Program Bantuan Keuangan Kepada Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dan berdasarkan sub indikator tahap persiapan program cukup maksimal dilaksanakan. Faktor yang menghambat, yaitu faktor sosialisasi, faktor fasilitas pendukung. Dampak pelaksanaan program cukup baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Kata Kunci: bantuan keuangan, desa, kesejahteraan masyarakat

PENDAHULUAN

Pemerintah Provinsi Riau berdasarkan Permen-
dagri No 39 Tahun 2010 tentang BUMDes
tanggal 25 Juni 2010 memberikan bantuan
keuangan kepada pemerintah desa dan kelurahan
melalui program pemberdayaan desa. Kemudian
program ini didasarkan pada Pergub Provinsi
Riau: 132/XII/ Tahun 2005 tentang pedoman
umum dan petunjuk teknik pemberdayaan desa
(PPD) Provinsi Riau. Dengan tujuannya adalah
mendorong berkembangnya perekonomian mas-
yarakat desa; kemudian meningkatkan dorongan
berusaha bagi anggota masyarakat desa yang
berpenghasilan rendah; meningkatkan pengem-
bangan usaha dan penyerapan tenaga kerja bagi
masyarakat desa; mengurangi ketergantungan
masyarakat dari rentenir; meningkatkan peranan
masyarakat dalam pengelolaan dana usaha desa;
meningkatkan kebiasaan bergotong royong dan
gemar menabung secara tertib; meningkatkan

peran perempuan dalam perencanaan pelaksa-
naan kegiatan desa; memenuhi kebutuhan sarana/
prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat desa.

Provinsi Riau memiliki 10 kabupaten dan 2
kota terdapat sebanyak 152 kecamatan dan
1.711 desa. Hingga tahun 2012 sudah sebanyak
362 desa/kelurahan yang mendapatkan bantuan.
Berdasarkan data dapat diketahui bahwa per-
kembangan alokasi dana *sharing* antara pem-
prov dengan kabupaten/kota. Diketahui bahwa
asset dana PPD di desa ada yang sudah dise-
rahkan dan adapula yang masih dalam pendam-
pungan, hal inilah yang menjadi masalah, karena
setelah diserahkan kepada desa kinerja semakin
menurun dan pihak kabupaten/kota enggan
bertanggung jawab.

Kesejahteraan masyarakat tidak terlepas
dari pandangan masalah pembangunan ekonomi.
Menurut Sukirno (1996) pembangunan ekonomi
perlu dipandang sebagai meningkatnya pendapa-

tan perkapita masyarakat. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kemudian Bagi negara berkembang kegiatan pembangunan ekonomi ditujukan untuk mengurangi kemiskinan dengan jalan perbaikan-perbaikan pendapatan perkapita masyarakat dan perbaikan di berbagai sektor. Kemudian menurut Todaro (1995) pembangunan ekonomi sangat penting untuk mengurangi atau menghapus kemiskinan, ketimpangan dalam distribusi pendapatan dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan secara menyeluruh dan masalah kesejahteraan.

Menurut Syahwier (2007), kesejahteraan dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan primernya (*basic needs*) berupa sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Tapi definisi kesejahteraan dapat juga merupakan tingkat aksesibilitas seseorang dalam kepemilikan faktor-faktor produksi yang dapat ia manfaatkan dalam suatu proses produksi dan ia memperoleh imbalan bayaran (*compensations*) dari penggunaan faktor-faktor produksi tersebut. Semakin tinggi seseorang mampu meningkatkan pemakaian faktor-faktor produksi yang ia kuasai, maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan yang diraihnya. Demikian pula sebaliknya, orang menjadi miskin karena tidak punya akses yang luas dalam memiliki faktor-faktor produksi walaupun faktor produksi itu adalah dirinya sendiri. Kemiskinan dan kesejahteraan ibarat dua sisi mata uang yang tidak terlepas di mana pun diletakkan.

Mengamati masalah keterbelakangan di negara sedang berkembang menunjukkan adanya korelasi yang kuat antara pendidikan dan keterbelakangan yang terjadi. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Kinebo dalam Todaro (1995) yang mengatakan bahwa pendidikan di negara berkembang merupakan pencerminan serta sekaligus dari keterbelakangan, yang dari sanalah tampak kekurangan maupun kemiskinan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Ini merupakan bahaya sebenarnya, pendidikan di negara berkembang menjadi pilar salah satu faktor keterbelakangan tersebut.

Menurut Wahab (1990) agar suatu pelak-

sanaan kebijakan publik mencapai keberhasilan ternyata masih ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan pula, karena terdapat beberapa faktor yang erat kaitannya dengan masalah implementasi kebijakan seperti masalah lingkungan sosial, politik, ekonomi dan faktor-faktor lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap implementasi kebijakan.

METODE

Penelitian ini masuk dalam jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian dengan sumber data utama adalah kata-kata dan tindakan, sebagai sumber data dapat berupa seseorang, peristiwa, dokumen (hal atau benda) yang dapat dijadikan sumber informasi dan dapat memberikan data maupun informasi yang diperlukan sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan. Pada penelitian kualitatif menyajikan hasil penelitian dalam bentuk hasil jawaban informan tentang pertanyaan yang diajukan. Informan dalam penelitian ini adalah kepala desa dan masyarakat desa di Desa Muda Setia Kecamatan Sekijang Kabupaten Pelalawan dan informasi yang relevan dan akurat tentang masalah yang diteliti. Kemudian responden dari pendamping desa serta pengurus PPD di desa. Dasar pengambilan responden ini adalah pertimbangan mereka yang terpilih dan dianggap paling mengetahui mengenai masalah yang diteliti dengan metode *purposive sampling*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program Bantuan Keuangan Desa

Pelaksanaan Program Bantuan Keuangan Kepada Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dan berdasarkan sub indikator tahap persiapan program cukup maksimal dilaksanakan, hal ini terlihat dari tahap persiapan di mulai dengan berkoordinasi dengan semua instansi yang diikutsertakan yakni dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa serta masyarakat sebagai penerima program pemberdayaan desa

berupa UED-SP tersebut. Kemudian dalam musyawarah desa/kelurahan cukup maksimal terlaksana karena sudah melibatkan seluruh unsur dalam musyawarah desa dan melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa sebagai penerima program pemberdayaan masyarakat, sedangkan dalam identifikasi potensi dan penggalian gagasan cukup maksimal berjalan. Walaupun belum seluruh potensi yang ada didesa dilakukan penggaliannya, hal ini dikarenakan tidak semua potensi akan di terima namun yang menjadi prioritas yang diutamakan terutama untuk masyarakat miskin.

Selanjutnya pembukaan rekening dana usaha desa dan rekening UED-SP cukup maksimal dilaksanakan karena tidak ditemukan kendala dalam pelaksanaannya. Kemudian verifikasi usulan kegiatan dana usaha desa cukup maksimal dalam melakukan pemeriksaan sehingga masyarakat yang termasuk dalam perekonomian rendah lebih diutamakan dalam memperoleh program pemberdayaan desa. Sedangkan musyawarah desa/kelurahan tahap II belum cukup maksimal terlaksana karena dalam pelaksanaannya kesadaran masyarakat untuk membayar pinjaman tepat waktu masih sangat minim. Sedangkan proses penyaluran dana usaha desa cukup maksimal dilaksanakan karena pembina dan pengendali, serta memfasilitasi masyarakat dalam memberdayakan dirinya sendiri namun mengeluhkan waktu pencairan pinjaman dalam proses penyaluran dana usaha desa karena memakan waktu yang terlalu lama. Sedangkan pertanggungjawaban dana cukup maksimal terlaksana karena dari hasil pengamatan dan observasi di lapangan fasilitas penyebaran informasi masih sangat minim sekali, sehingga banyak masyarakat yang tidak tahu mengenai informasi-informasi dana pinjaman bergulir.

Kemudian pelaksanaan kegiatan dana usaha desa cukup maksimal karena kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan yang diajukan, dan masyarakat juga di beri pendampingan dan pembinaan terhadap hasil usahanya selama 2 tahun dan ini sudah berjalan dengan baik. Kemudian persyaratan sebagai pemanfaat dana usaha desa cukup maksimal, namun pelaksanaan pemba-

yan pinjaman terkadang lambat dalam pelaksanaannya sehingga agunan yang menjadi jaminan terpaksa dijualkan kepihak ketiga.

Faktor yang Mempengaruhi Program Bantuan Keuangan Kepada Desa

Faktor Sosialisasi

Sosialisasi yang diberikan pemerintah provinsi maupun pengelola UED-SP kepada masyarakat masih belum cukup untuk membantu masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan desa ini. Sedangkan tenaga pendamping masih belum tahu benar tentang program pemberdayaan desa ini, sehingga jika ada masalah lambat dalam penyelesaiannya.

Fasilitas Pendukung

Fasilitas pendukung belum cukup maksimal dalam pelaksanaan program, karena masih kurangnya fasilitas yang tersedia seperti papan informasi yang tidak ada. Selain itu komputer yang tersedia juga sangat terbatas, sehingga menyulitkan pengelola dalam menjalankan kegiatannya.

Program Bantuan Keuangan Kepada Desa dan Kelurahan dalam Perkembangan Ekonomi Masyarakat

Dalam Implementasi Kebijakan Pergub No 132/XII/ 2005 Tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis PPD, maka pemerintah Provinsi Riau memberikan bantuan pemberdayaan desa kepada desa-desa yang ada di provinsi Riau agar masyarakatnya mampu meningkatkan pendapatannya.

Mendorong Berkembangnya Perekonomian Masyarakat Desa

Program pemberdayaan desa yang diselenggarakan didesa muda amanah, telah mampu meningkatkan perekonomian masyarakat, masyarakat tidak lagi tergantung pada lingkungan sekitar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selain itu tingkat pendidikan anak juga sudah membaik. PPD berupa UED-SP di Desa Muda Setia cukup maksimal karena telah mampu men-

dorong berkembangnya perekonomian masyarakat desa dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Muda Setia secara signifikan.

Meningkatkan Dorongan Berusaha Bagi Anggota Masyarakat yang Berpenghasilan Rendah

Dalam rangka mendukung peningkatan perekonomian masyarakat berpendapatan rendah, berbagai usaha pemerintah lakukan untuk pemberdayaan masyarakat terutama di Desa Muda Setia berupa program yang bisa menunjang perekonomian masyarakat seperti meningkatkan kapasitas dan memperluas jangkauan lembaga keuangan mikro (LKM) baik dengan pola bagi hasil, konvensional maupun melalui dana bergulir. Selain itu peningkatan sarana dan prasarana seperti meningkatkan fasilitas pemasaran dan promosi dari hasil produksi. Namun begitu yang namanya program bantuan belum sepenuhnya mampu mengatasi kemiskinan dan dalam pelaksanaan di lapangan masih mengalami kendala. Meningkatkan dorongan berusaha bagi anggota masyarakat yang berpenghasilan rendah belum maksimal terlaksana, masih ditemukan adanya kendala dalam pelaksanaan karena tidak semua program akan berjalan lancar, namun ada kendala dalam program pemberdayaan tersebut.

Meningkatkan Pengembangan Usaha Dan Penyerapan Tenaga Kerja Masyarakat Desa

Dalam rangka meningkatkan pengembangan usaha dan penyerapan tenaga kerja, pemerintah membuat berbagai kebijakan yang bisa meningkatkan usaha masyarakat, namun dalam pelaksanaan tersebut pemerintah mengalami berbagai kenyataan dalam pembukaan lapangan kerja sedangkan sumber daya yang tersedia masih sangat minim terutama dalam memproduksi hasil usaha yang belum sesuai dengan permintaan pasaran, walaupun kami sudah menambah karyawan kami namun mereka belum tahu benar bagaimana cara memproduksinya.

Dalam rangka meningkatkan pengembangan usaha dan penyerapan tenaga kerja cukup maksimal karena pemerintah perlu melakukan pengembangan potensi melalui sumber daya ma-

nusia yang dimiliki dalam rangka untuk meningkatkan usaha yang dimiliki masyarakat namun sumberdaya yang tersedia tersebut belum mampu melaksanakan produksi dengan baik karena sumberdaya yang tersedia masih minim sehingga belum maksimal dalam melaksanakan kebijakan.

Mengurangi Ketergantungan Masyarakat Dari Rentenir

Ketergantungan masyarakat dengan rentenir disebabkan minimnya kemampuan Kepala Desa Muda Setia dalam membuat kebijakan yang bisa mengatasi masyarakat dari tingkat kemiskinan, namun dapat diatasi dengan mendukung program pemberdayaan masyarakat dari pemerintah dan mengutamakan masyarakat miskin dalam memperoleh program, dengan itu tingkat kemiskinan semakin menurun dan angka ketergantungan dengan rentenir juga menurun. Adanya program pemberdayaan desa dalam bentuk UED-SP ini cukup maksimal menurunkan angka ketergantungan masyarakat terhadap rentenir dan masyarakat mendukung program pemberdayaan desa dalam bentuk UED-SP ini.

Meningkatkan Peranan Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Masyarakat Desa

Peningkatan peranan masyarakat dalam pengelolaan dana masyarakat desa dapat dilakukan dengan transparansinya pelaksanaan program pemberdayaan terutama yang berkaitan dengan dana dan dapat dilakukan melalui desentralisasi program, yakni pemberian kewenangan kepada masyarakat atau lebih mendasar adalah sejauh mana masyarakat memperoleh kembali hak-haknya yang otonom secara mandiri dan partisipatif dan berkelanjutan jika kami sebagai masyarakat penerima program pemberdayaan ikut serta dalam pengambilan keputusan penting dalam PPD dan di lakukan melalui musyawarah dan bersifat kompetisi secara sehat untuk menentukan prioritas kegiatan yang didanai, mengutamakan alternatif, menghindari setiap upaya dominasi, mengutamakan keterlibatan masyarakat pada musyawarah, serta unsur mufakat. Meningkatkan peranan masyarakat dalam pengelolaan

dana masyarakat desa sudah maksimal terlaksana, hal ini terlihat dari keikutsertaan masyarakat dalam program pemberdayaan UED-SP dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat dari adanya program tersebut.

Meningkatkan Kebiasaan Bergotong Royong dan Gemar Menabung

Untuk meningkatkan kebiasaan bergotong royong dan gemar menabung dapat dilakukan dengan membantu meningkatkan peran masyarakat desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan dapat meningkatkan adat kebiasaan bergotong royong dan gemar menabung secara tertib, teratur dan berkelanjutan sehingga ekonomi masyarakat desa disektor informal dapat menyerap tenaga kerja masyarakat di desa, kemudian diberi pelatihan tentang kreativitas berwirausaha anggota masyarakat desa yang berpenghasilan rendah kemudian hasil dari kreativitas tersebut dibantu oleh pemerintah seperti dalam hal promosi.

Untuk meningkatkan kebiasaan bergotong royong dan gemar menabung cukup maksimal dilaksanakan karena dilakukan dengan pemihakan dan pemberdayaan masyarakat miskin dalam proses pembangunan untuk mewujudkan masyarakat maju, mandiri dan sejahtera melalui kegiatan ekonomi oleh orang banyak dengan skala kecil dan mengelola sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan dapat meningkatkan adat kebiasaan bergotong-royong dan gemar menabung secara tertib, teratur dan berkelanjutan.

Meningkatkan Peranan Perempuan dalam Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan

Dalam meningkatkan peranan perempuan dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan dengan transparansinya perencanaan pelaksanaan program pemberdayaan terutama yang berkaitan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan, selain itu dapat dilakukan melalui desentralisasi program, yakni pemberian kewenangan kepada pihak perempuan untuk memperoleh hak-haknya yang otonom secara mandiri

dan partisipatif dan berkelanjutan serta membantu masyarakat penerima program pemberdayaan dalam pengambilan keputusan penting dalam program pemberdayaan tersebut, yaitu dengan mengutamakan alternatif, menghindari setiap upaya dominasi, mengutamakan keterlibatan masyarakat pada musyawarah, serta unsur mufakat. Meningkatkan peranan perempuan dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan cukup maksimal terlaksana, hal ini terlihat dari keikutsertaan kaum perempuan dalam pelaksanaan program pemberdayaan UED-SP mencapai dari 30%, terutama pada saat musyawarah desa tentang pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan UED-SP.

Faktor yang menghambat pelaksanaan program bantuan keuangan kepada Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, faktor sosialisasi yang diberikan pemerintah provinsi maupun pengelola UED-SP kepada masyarakat masih belum cukup maksimal untuk membantu masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan desa ini, sedangkan tenaga pendamping masih belum tahu benar tentang program pemberdayaan desa ini, sehingga jika ada masalah lambat dalam penyelesaiannya. Sedangkan fasilitas pendukung belum cukup maksimal dalam pelaksanaan program, karena masih kurangnya fasilitas yang tersedia seperti papan informasi yang tidak ada, selain itu komputer yang tersedia juga sangat terbatas, sehingga menyulitkan pengelola dalam menjalankan kegiatannya.

SIMPULAN

Kesimpulannya bahwa pelaksanaan Program Bantuan Keuangan Kepada Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dan berdasarkan sub indikator tahap persiapan program cukup maksimal dilaksanakan. Faktor yang menghambat yaitu faktor sosialisasi, faktor fasilitas pendukung. Dampak pelaksanaan program cukup baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

DAFTAR RUJUKAN

- Abidin, Zainal, 2002. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Curah.
- Agus Dwiyanto, 2005. *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press:
- Adi, 1996, *Psikologi Pekerjaan Sosial dan Ilmu Kesejahteraan Sosial Sebagai Dasar Pemikiran*, Jakarta: Rajawali Grafindo Persada
- Drukker, 1964. *Managing For Result*. New York: Harper & Row.
- Dunn, William, 1981. *Public Policy Analysis. An Introduction*: Englewood Cliffs. N.J. : Prectice - Hall. Inc.
- Dwiyanto, 1995. *Reformasi Birokarasi Publik di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan
- Edward, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Inc.
- Grindle, 1980. *Policy Content and Context in Implementation Princeton*. New Jersey: University Press.
- Islami, M. Irfan. 1997. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negera*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kusnadi, 1993, *Potret Kesejahteraan Rakyat* Jakarta: Rajawali Grafindo Persada
- Meter dan Hom, 1975. *The Policy Implementation Process. A Conceptual Framework*, Administration and Society 6
- Moleong, Lexy, 2006. *Metodologi Penulisan Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Prawirosentono, 1999. *Kebijakan Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: BPFE
- Sinambela, Lijan Poltak, dkk, 2008. *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Singarimbun, 1989. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES
- Syafi'i, 1999. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Topatimasang, 2000. *Merubah Kebjiakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Wahab, Abdul, 1997. *Analisis Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta
- Wibawa, 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- William Dunn, 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press.